

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara agraris dimana sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan penunjang negara dalam menekan angka kesejahteraan. Sebagian besar wilayah Indonesia dijadikan sebagai lahan pertanian sebagai dijelaskan pada tabel 1.1 dibawah

Tabel 1. 1
Luas Daerah dan Luas Wilayah Pertanian di Indonesia

No	Provinsi	Luas Panen (ha)	Luas daerah (ha)
1.	Aceh	271.750	5.683.475
2.	Sumatera Utara	411.462	7.246.074
3.	Sumatera Barat	271.883	4.211.954
4.	Riau	51.054	8.993.590
5.	Jambi	60.540	4.902.658
6.	Sumatera Selatan	513.378	8.677.168
7.	Bengkulu	57.152	2.012.834
8.	Lampung	518.256	3.357.026
9.	Kepulauan Bangka Belitung	15.105	1.669.013
10.	Kepulauan Riau	179	826.971
11.	DKI Jakarta	477	66.098
12.	Jawa Barat	1.662.404	3.704.486
13.	Jawa Tengah	1.688.670	3.433.749
14.	D.I Yogyakarta	110.927	317.064
15.	Jawa Timur	1.693.211	4.803.684
16.	Banten	337.241	935.277
17.	Bali	112.321	559.015
18.	Nusa Tenggara Barat	270.093	1.967.589
19.	Nusa Tenggara Timur	183.092	4.644.664
20.	Kalimantan Barat	241.479	14.703.704
21.	Kalimantan Tengah	108.227	15.344.391
22.	Kalimantan Selatan	214.909	3.713.505
23.	Kalimantan Timur	64.970	12.698.128
24.	Kalimantan Utara	8.604	7.010.118
25.	Sulawesi Utara	58.196	1.450.027
26.	Sulawesi Tengah	168.993	6.160.572

27.	Sulawesi Selatan	1.038.084	4.533.055
28.	Sulawesi Tenggara	118.259	3.615.971
29.	Gorontalo	46.823	1.202.515
30.	Sulawesi Barat	69.324	1.659.475
31.	Maluku	23.988	4.615.827
32.	Maluku Utara	6.416	3.299.870
33.	Papua Barat	5.461	9.939.826
34.	Papua	49.742	31.281.636
	Jumlah	10.452.672	189.241.009

Sumber BPS Indonesia 2022

Berdasarkan data tabel 1.1 di atas ini bisa dilihat bahwa Indonesia, bisa disebut sebagai negara pertanian. Karena sebagian besar wilayah Indonesia digunakan sebagai pertanian dengan luas 10.452.672 ha dan dilihat dari luas daerah Indonesia sebesar 189.241.009 ha.¹ Pertanian di Indonesia sangat bergantung dengan hasil produksi padi, produksi padi di Indonesia pada tahun 2021 berjumlah 54.415.294 ton sedangkan pada tahun 2022 berjumlah 54.748.977 ton.² Melalui produksi ini bisa dilihat bahwa pada tahun 2022 hasil yang didapatkan naik sebesar 333.683 ton. Dalam sebuah pertanian salah satu hasil produksi sawah adalah padi. Untuk menunjang hasil padi diperlukan beberapa akses sumber daya, yaitu ketersediaan lahan, sumber daya manusia, topografi, iklim, unsur hara tanah dan salah satunya adalah ketersediaan air.³

Irigasi adalah suatu sistem teknis yang dirancang untuk menyediakan air bagi tanaman pertanian dengan cara terorganisir dan terkontrol. Sistem irigasi

¹ BPS Indonesia. Luas Daerah dan Luas Wilayah Pertanian di Indonesia 2023. (2023). Statistik Indonesia.

² BPS Indonesia. Hasil Produksi Padi, Produksi Padi di Indonesia (2022). BPS INDONESIA 2022.

³ Pratama, N. G. (2013). Pemberdayaan Masyarakat Padi Organik (Studi Pemberdayaan Paguyuban Petani Al-Barokah Desa Ketapang Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang). 2(2), 56–60.

memungkinkan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan produksi tanaman dan memastikan pasokan air yang cukup, terutama bagi daerah-daerah yang tidak mendapatkan curah hujan. Selain itu untuk mengurangi resiko kekeringan atau gagal panen bagi petani. Dalam pembuatan irigasi diperlukan perencanaan, pembuatan, pengolahan serta pemeliharaan sarana untuk mengambil air dari sumber air dan membagi air tersebut secara teratur.⁴

Indonesia memiliki beberapa daerah irigasi yang menjadi kewenangan pusat, kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten/kota hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Melalui tabel dibawah ini bisa dilihat pembagian daerah irigasi:⁵

Tabel 1. 2
Pembagian Kewenangan Daerah Irigasi di Sumatera Barat

Pembagian Kewenangan di Sumatera Barat	Jumlah Daerah Irigasi	Luas Kewenangan (ha)
Kewenangan Pusat	11	76.471
Kewenangan Provinsi	65	65.007
Kewenangan Kabupaten/Kota	3.133	222.828

Sumber: Dinas PUPR 2024

Berdasarkan tabel 1.2 bisa dilihat pembagian kewenangan Daerah Irigasi di Provinsi Sumatera. Pertama kewenangan yang dipegang oleh pusat dengan jumlah daerah irigasi 11 buah dan luas Daerah Irigasi 76.471 ha, kedua kewenangan

⁴ Pane Yunita Suhelmi, A. (2021). PASCA CONTROL VALVE PADA IRIGASI PERSAWAHAN. umsupress.

⁵ KEMEN-PUPR. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015. 590.

provinsi yang berjumlah 65 buah dengan luas Daerah Irigasi 65.007 ha dan ketiga kewenangan kabupaten/kota yang berjumlah 3.133 dengan luas daerah 222.828 ha.

Provinsi Sumatera Barat juga memiliki daerah irigasi yang perlu diperhatikan kegunaan dan fungsi seperti: memasok kebutuhan air pada tanaman, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, menurunkan suhu tanah, dan mengurangi kerusakan tanah.⁶ Sebagaimana dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 3
Status Daerah Irigasi yang Menjadi Wewenang dan Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten /Kota Provinsi Sumatera Barat

No	Nama Kabupaten	Daerah Irigasi (D.I)	Luas (ha)
1.	Kabupaten Agam	295	29.013
2.	Kabupaten Dharmasraya	60	1.657
3.	Kabupaten Kepulauan Mentawai	6	392
4.	Kabupaten Lima Puluh Kota	370	22.781
5.	Kabupaten Padang Pariaman	415	25.611
6.	Kabupaten Pasaman	229	16.100
7.	Kabupaten Pasaman Barat	95	12.138
8.	Kabupaten Pesisir Selatan	249	20.907
9.	Kabupaten Sijunjung	119	9.229
10.	Kabupaten Solok	308	31.139
11.	Kabupaten Solok Selatan	94	11.734
12.	Kabupaten Tanah Datar	635	29.421
13.	Kota Bukittinggi	12	588
14.	Kota Padang	29	4.240
15.	Kota Padang Panjang	31	837
16.	Kota Pariaman	17	2.202
17.	Kota Payakumbuh	65	2.455
18.	Kota Sawahlunto	87	1.724
19.	Kota Solok	17	661
JUMLAH		3.133	222.828

Sumber: Dinas PUPR 2024

⁶ Ibid

Melalui data ini bisa dilihat jumlah daerah irigasi per kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dimana daerah irigasi terbanyak berada pada Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah daerah irigasi 635 buah dan luas daerah irigasi terbesar berada pada Kabupaten Solok dengan luas daerah 31.139 ha. Dengan adanya data irigasi ini bisa dilihat juga hasil yang didapatkan para petani berupa hasil padi per tahunnya di provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:⁷

Tabel 1. 4
Produksi Padi di Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/ Kota (ton GKG) 2018-2022

Kabupaten /Kota	Produksi Padi (ton GKG)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	2.366,65	2.087,24	514	941	1.387
Pesisir Selatan	187.124,75	200.179,84	144.382	146.141	161.639
Solok	163.264,85	168.452,01	155.666	171.335	179.315
Sijunjung	61.582,13	50.559,25	62.873	49.838	53.949
Tanah Datar	183.124,27	194.266,51	174.619	182.566	169.881
Padang Pariaman	148.230,33	155.475,13	144.847	115.529	135.072
Agam	178.557	160.888,26	171.537	152.607	137.633
Lima Puluh Kota	149.487,43	135.314,94	134.254	123.703	118.608
Pasaman	137.512,41	149.440,66	149.375	129.629	144.110
Solok Selatan	64.491,03	62.326,80	48.497	54.869	49.760
Dharmasraya	33.512,39	32.927,12	37.068	25.538	47.555
Pasaman Barat	52.171,59	42.546,23	45.927	52.248	50.317
Kota					
Padang	56.266,99	62.877,24	48.462	47.258	45.242
Solok	12.385,75	13.737,85	17.581	12.776	13.946

⁷ BPS Sumbar, Produksi Padi di Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten/ Kota (ton GKG) (2023). BPS SUMBAR 2023.

Sawahlunto	6.762,92	6.769,08	5.578	7.897	11.600
Padang Panjang	3.720,82	4.532,96	4.668	4.934	5.789
Bukittinggi	5.481,12	5.266,31	3.776	3.325	4.083
Payakumbuh	21.312,92	19.957,73	23.548	24.858	27.224
Pariaman	15.721,13	15.390,85	14.097	11.217	16.419
Sumatera Barat	1.483.076,48	1.482.996,01	1.387.269	1.317.209	1.373.532

Sumber: BPS Sumatera Barat 2023

Berdasarkan data ini bisa dilihat bahwa produksi padi yang dihasilkan setiap tahunnya di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan hasil, melalui data ini juga bisa dilihat bahwa tahun 2021 hasil padi yang didapatkan petani sebesar 1.317.209 ton, pada lima tahun terakhir bisa dilihat bahwa ini merupakan penurunan paling drastis pada lima tahun belakangan, salah satu dampak yang terjadi karena kurangnya pengelolaan irigasi yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Irigasi merupakan salah satu penyokong sektor pertanian sehingga keandalan air irigasi perlu mendapat perhatian bersama dan pengelolaannya dilaksanakan bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat.⁸ Karena banyak dari petani yang tidak mementingkan kebutuhan air untuk bersama yang membuat pengaliran air irigasi di petak sawah lain ada yang tersumbat bahkan tidak sampai kepada petak sawah yang dimiliki petani lain yang membuat hasil padi yang didapatkan menurun.

Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat kepada petani agar mampu meningkatkan hasil padi pada tahun selanjutnya melalui P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang dibentuk masyarakat untuk mengatasi

⁸ Riyanto, A., Harsanto, B. T., & Sukarso. (2018). Partisipasi Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air Dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. 1(1), 1–13.

permasalahan yang terjadi di daerah, dimana dalam aksi nyata operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pemerintah juga tidak diam mengenai masalah yang terjadi tetapi turut andil dalam menyelesaikan masalah dengan memberikan bantuan kepada P3A. Alasan peneliti mengambil P3A dalam penyelesaian masalah padi di Kabupaten Pasaman, karena P3A merupakan salah satu upaya yang dilakukan masyarakat, dalam penyelesaian masalah yang dirasakan petani berupa pengaliran air yang tidak merata pembagiannya ke seluruh petak sawah, sehingga dibutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui P3A yang ada di Kabupaten Pasaman.

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten yang bergantung dengan hasil produksi padi. Karena pada umumnya mata pencaharian di daerah pasaman adalah petani. Melalui hasil PDRB Kabupaten Pasaman pada tahun 2022 bisa diketahui bahwa PDRB tertinggi dipegang pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 46,38 %.⁹ Alasan peneliti mengambil Kabupaten Pasaman sebagai tempat penelitian karena Pada tahun 2020 -2022 Pemerintah Kabupaten Pasaman Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR dari Direktorat Irjen IRWA (Irigasi dan Rawa) mendapatkan bantuan hibah pengembangan sawah beririgasi terintegrasi yang disebut *Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)* yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten program dilaksanakan di 74 Kabupaten dalam 16 Provinsi dan salah satu kabupaten yang menerima program ini yaitu

⁹ BPS Kabupaten Pasaman, PDRB Kabupaten Pasaman pada tahun 2022 (2023). BPS KABUPATEN PASAMAN.

Kabupaten Pasaman. dikarenakan pasaman dianggap sukses mempertahankan lumbung pangan nasional oleh pemerintah pusat, untuk DPUPR Kab. Pasaman mendapatkan Alokasi dana sebesar Rp.26.000.000.000,-(Dua Puluh enam Milyar Rupiah) bantuan berupa operasi/pemeliharaan irigasi, pemberdayaan Irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan Elektronik Penilaian Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (EPAKSI). Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan luas daerah pertanian dan sawah beririgasi mencapai total 33.772,98 Ha dengan total hasil panen dari padi sawah mencapai 149.375,47 Ton/tahun, dimana untuk total seluruh sawah beririgasi di Pasaman mencapai 28.800 Ha.¹⁰

Melalui tabel 1.4 diatas terlihat bahwa hasil padi yang didapatkan kabupaten di Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan merupakan tiga penghasil padi terbesar di Provinsi Sumatera Barat dengan produksi padi 161.639 ton. Kemudian jika dilihat hasil padi Kabupaten Pasaman adalah 144.110 ton, hasil padi yang didapatkan di Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 161.639 ton. Alasan peneliti membandingkan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan karena bentuk topografi yang dimiliki dua kabupaten ini sama yaitu terdiri dari daratan, gunung dan perbukitan yang merupakan bukit barisan dan Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB) kedua kabupaten ini tertinggi dipegang oleh bagian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Ini sangat mengherankan jika situasi tersebut terjadi dibandingkan dengan Kabupaten Pasaman jika dilihat dari luas panen padi yang

¹⁰ Rhama Fitra, Rini Mulyani, dan B. A. (2023). EVALUASI KINERJA IRIGASI PADA PROGRAM IPDMIP BERBASIS EPAKSI DI KABUPATEN PASAMAN.

dimiliki. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki luas panen padi 28.779 Ha. Sedangkan daerah Kabupaten Pasaman memiliki luas panen padi 29.509 Ha.

Melalui luas wilayah ini bisa diketahui Kabupaten Pasaman memiliki wilayah yang lebih besar tapi jumlah padi yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dengan ini bisa dipahami bahwa pengelolaan irigasi yang ada di Kabupaten Pasaman bisa dikatakan kurang baik, sehingga Kabupaten Pasaman mengalami ketidak konsistenan hasil panen padi selama lima tahun terakhir. Penyimpang ini muncul karena petani menghadapi kesulitan terkait sumber daya air, penyebab masalah terletak pada kurangnya pengelolaan jaringan tersier oleh petani di wilayah irigasi sawah. Keterbatasan optimalisasi pasokan air dari irigasi primer dan sekunder menjadi penyebab utama ketidak konsistenan hasil panen padi yang diperoleh.

Dengan permasalahan yang dirasakan petani maka dibentuklah sebuah Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan suatu organisasi yang mengatur petani dalam melakukan pelaksanaan pertanian. Sebagaimana dibentuknya P3A di Kabupaten Pasaman yang bisa dilihat pada tabel dibawah ini.¹¹

Tabel 1. 5
Data P3A yang ada di Kabupaten Pasaman

No	Kecamatan	Jumlah P3A	Luas daerah P3A (ha)
1.	Tigo Nagari	42 buah	4.021,73
2.	Bonjol	24 buah	1.096,01
3.	Simpang Alahan Mati	27 buah	448,24
4.	Lubuk Sikaping	45 buah	1.851,94
5.	Duo Koto	32 buah	729,66

¹¹ BPS Kabupaten Pasaman. LUAS DAN JUMLAH P3A DI KABUPATEN PASAMAN. (2023). BPS Kabupaten Pasaman

6.	Panti	10 buah	398,54
7.	Padang Gelugur	6 buah	715,41
8.	Rao	8 buah	327,28
9.	Rao Utara	15 buah	741,82
10.	Rao Selatan	6 buah	185,68
11.	Mapat Tunggul	2 buah	23,33
12.	Mapat Tunggul Selatan	7 buah	81,19
	Jumlah keseluruhan	224 buah	10.620,83

Sumber: Dinas PUPR 2024

Jika dilihat dari data ini bisa dilihat bahwa jumlah P3A yang ada di Kabupaten Pasaman berjumlah 224 buah dengan luas daerah irigasi sebesar 10.620,83 hektare. Melalui data ini jumlah P3A yang ada di Kecamatan Bonjol berjumlah 24 buah dengan luas daerah 1.096,01 Hectare. Alasan peneliti mengambil P3A di Kecamatan Bonjol adalah karena Kecamatan Bonjol dapat bantuan P3 TGAI dari Kementerian PUPR Berturut-turut pada tahun 2021- 2022. P3 TGAI adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air yaitu pemberian anggaran berupa dana untuk meningkatkan layanan jaringan irigasi kepada P3A. Dalam memberikan dana kepada P3A, pemerintah menetapkan persyaratan agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku:

1. P3A memiliki AKTA NOTARIS
2. P3A memiliki AD/ART
3. P3A memiliki Kantor
4. P3A memiliki SK WALI
5. P3A melakukan rapat anggota rutin
6. P3A memiliki rekening sendiri
7. P3A memiliki peta petak sawah
8. P3A memiliki keanggotaan tetap dan demokratis

9. P3A memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sendiri.

Selanjutnya yang di Kecamatan Bonjol sudah banyak yang mendapatkan SK NOTARIS dan yang terakhir adalah Kegiatan P3 TGAI di Kecamatan Bonjol dinilai sukses oleh di Kementerian PUPR. Pada Nagari Limo Koto terdapat beberapa P3A yaitu P3A Aia Abu, P3A Aia Kijang, P3A Aia Dareh, P3A Aia Dareh 2, P3A Aia Biso 1 dan P3A Aia Biso 2. Salah satu P3A yang dinilai berhasil adalah P3A AIA DAREH I Nagari Limo Koto. Alasan pemilihan P3A AIA DAREH 1 adalah P3A ini aktif dalam mengembangkan irigasi melalui keaktifan ini daerah irigasi aia dareh selalu mendapatkan bantuan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) irigasi selanjutnya P3A ini merupakan salah satu yang mempunyai SK NOTARIS dan yang terakhir P3A yang berhasil melakukan kegiatan P3-TGAI di kecamatan Bonjol. P3A mempunyai 3 kriteria yang menjadi pedoman untuk pelaksanaannya:

1. P3A berkembang ini terlihat dengan P3A ini akan membuat SK notaris yang dibantu oleh Dinas PUPR,
2. P3A tidak berkembang ini terjadi karena AD/ART yang telah dibuat tidak sesuai dengan verifikasi ke lapangan yang dilakukan,
3. P3A mandiri, P3A bisa dikatakan mandiri karena P3A itu telah menerima SK notaris dan pemberdayaan melalui pengelolaan telah bisa meningkatkan perekonomian petani.

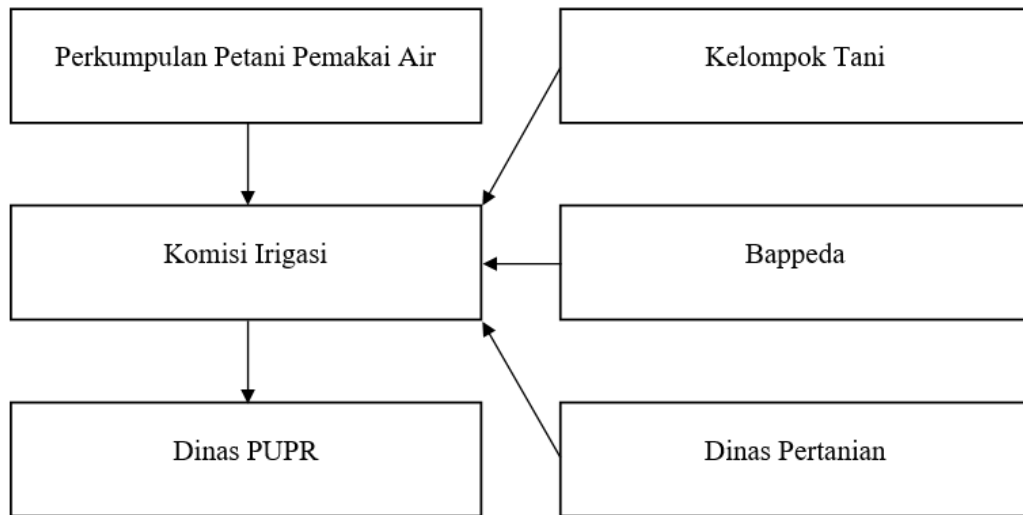
Hal ini sesuai dengan pendapat dari bapak Rhama Fitra sebagai Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR:

“P3A dalam melaksanakan sebuah kegiatan terbagi menjadi 3 kriteria: pertama P3A yang tidak

berkembang ini terlihat dari AD/ART yang tidak jelas kedua P3A yang berkembang ini terlihat dia telah mempunyai sk wali nagari dan P3A ini ingin membuat SK notaris, ketiga P3A mandiri P3A yang punya SK notaris maka P3A ini telah bisa mengelola organisasinya”. (Wawancara dengan Bapak Rhama Fitra S.T.M.T Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Pasaman 21 November 2023 pukul: 10.00 WIB).

Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) dikembang oleh setiap daerah yang ada di Indonesia, tercatat Kabupaten Pasaman juga mempunyai P3A, terciptanya P3A harus melalui beberapa tahap agar ini bisa menjadi sebuah organisasi. Tahap pertama dengan melaksanakan rapat membahas tentang perangkat dan AD /ART setelah itu tahap kedua AD/ART yang telah sah di ajukan ke Wali Nagari agar dibuat SK. Setelah SK (Surat Keputusan) dibuat maka diverifikasi oleh dinas PUPR sebagaimana tugas yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas PUPR untuk terjun langsung ke daerah memastikan ada atau tidak sawah yang digarap dan sesuai dengan AD/ART yang telah dibuat apabila benar yang dibuat dari AD/ ART maka P3A di suatu daerah telah sah menjadi organisasi. P3A berkoordinasi dengan wali nagari dan pemerintah kabupaten mengenai pemeliharaan irigasi air.

Gambar 1. 1
Koordinasi kabupaten sampai P3A



Sumber: Dinas PUPR

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan bagian dalam kinerja irigasi dalam Dinas PUPR yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 12 /PRT / 2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi. Dimana indek kinerja irigasi ini terdiri dari:¹²

1. Prasarana Fisik 45%
2. Produktivitas Tanam 15%
3. Sarana Penunjang 10%
4. Organisasi Personalia 15%
5. Dokumentasi 5%

¹² Peraturan Menteri PUPR No 12 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pasal 1 ayat 24. (2015). 21(1).

6. P3A 10%

Pemberdayaan P3A tersebut dimaksudkan untuk memberi mereka kemampuan untuk berdiri sendiri dan berpartisipasi secara aktif dalam pengembangan dan administrasi sistem irigasi yang mencakup beberapa hal, seperti : penciptaan organisasi hingga menjadi badan hukum, meningkatkan keterampilan ,teknik administrasi irigasi ,teknik pertanian, dan meningkatkan kemampuan manajemen finansial untuk mengurangi ketergantungan pada orang lain.¹³

Dengan menciptakan Perkumpulan Petani Pemakai Air, pengelolaan irigasi yang dilakukan dengan cara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan panen padi petani, atau disebut P3A sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan irigasi.¹⁴ Dalam pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 30 PRT tahun 2015 tentang pengembangan dan pengelolaan sistem jaringan irigasi yang tertuang pada pasal 4 ayat 2 tentang Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan di seluruh daerah irigasi diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat Petani/P3A/GP3A/IP3A.¹⁵

¹³ Marupah, Kadir, M., & Ahmad, A. (2016). Penerapan pengelolaan irigasi partisipatif (pip) bagi perkumpulan petani pemakai air (P3A) di kecamatan turatea kabupaten jenepono sulawesi selatan. 1(2), 105–112.

¹⁴ Riyanto, A., Harsanto, B. T., & Sukarso. (2018). Partisipasi Anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air Dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. 1(1), 1–13.

¹⁵ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. 1, 1–8.

P3A AIA DAREH 1 memiliki wilayah tugas dengan jumlah wilayah petak sawah sebesar 51 Ha dengan luas wilayah irigasi sebesar 241 Ha dalam tugas utama dari P3A adalah mengatur debit air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah masyarakat sebesar 0,7 m³/detik di dalam P3A AIA DAREH 1 terhimpun 2 Kelompok Tani yaitu Kelompok Tani Merpati yang berjumlah 90 orang dan Kelompok Tani Saridewi yang berjumlah 51 orang dimana jumlah petani yang terhimpun berjumlah 141 orang. P3A mempunyai sasaran menyelesaikan problem yang dirasakan petani seperti hubungan sosial antar petani, konflik air, konflik antar P3A, dan faktor sumber daya manusia rendah selain itu juga berusaha untuk mensejahterakan petani, sebagaimana tugas dari P3A AIA DAREH I:¹⁶

1. Mengelola air dan jaringan irigasi pada areal P3A AIA DAREH I Nagari Limo Koto sehingga dapat dimanfaatkan para anggota secara tepat guna dan berhasil guna dalam memenuhi kebutuhan pertanian dan memperhatikan unsur pemerataan di antara sesama petani dan pengguna.
2. Melakukan pemeliharaan dan pengawasan jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat tetap terpelihara kelangsungan fungsinya.
3. Menentukan dan mengatur iuran dari para anggota yang berupa uang, hasil panen atau tenaga untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi serta usaha pengembangan sebagai suatu organisasi

¹⁶ Adrt & SK pengukuhan P3A Aia DAREH I.pdf. (n.d.).

4. Membimbing dan mengawasi para anggota memenuhi segala peraturan yang ada hubungan dengan pemakai air yang dikeluarkan pemerintah pusat, daerah dan atau perkumpulan
5. Melakukan pengembangan usaha agribisnis dan usaha lainnya untuk kesejahteraan anggota.

P3A merupakan upaya membantu pemerintah dalam pengelolaan, pengoperasionalan dan pemeliharaan jaringan irigasi yang dilakukan secara individu petani pemakai air atau secara kelompok. Dengan ini Dinas PUPR berusaha melakukan pemberdayaan berupa diskusi dan pelatihan kepada anggota P3A agar meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki, dan rasa bertanggung jawab akan organisasi yang dimiliki. Ruang lingkup kegiatan P3A AIA DAREH I Nagari Limo Koto adalah:

- a) Mendayagunakan seluruh air yang ada pada P3A AIA DAREH I Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dalam daerah irigasinya
- b) Memecahkan masalah-masalah yang dihadapi secara langsung atau tidak langsung seperti pola tanam dan tata tanam, sarana produksi, seperti pupuk, pestisida dan penggunaan air lainnya serta pendayagunaan jaringan
- c) Meningkatkan keterampilan petani di bidang pengelolaan air irigasi, usaha tani, tata tanam dalam berorganisasi dan usaha ekonomi

Upaya pemberdayaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pemberdayaan kepada P3A AIA DAREH 1 dengan melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Memelihara bendungan induk
- 2) Memperbaiki jaringan irigasi air
- 3) Melakukan bimbingan kepada petani

Langkah pemberdayaan tersebut diimplementasikan karena hambatan utama yang dihadapi apabila bendungan ini tidak dikelola dengan baik maka fungsi yang diperlukan tidak tercapai yaitu menahan dan menampung air yang diperlukan. Dana yang didapat dari P3-TGAI sebesar 195 juta merupakan dana yang diberikan pemerintah kepada P3A AIA DAREH 1 untuk memperbaiki bendungan induk, dan melakukan perbaikan pada jaringan apabila jaringan itu bocor atau runtuh dengan menutup dengan karung dan dengan mengajukan biaya pemeliharaan musiman yang tidak dilakukan secara rutin jika jaringan tersebut menjadi lebih kritis maka P3A akan menyampaikan keluhan ini kepada dinas pu bagian pengairan dimana manfaat utama dari jaringan irigasi P3A AIA DAREH 1 adalah mengaliri sawah yang dimiliki petani dan mencukupi kebutuhan air kolam masyarakat. Adapun perbaikan bendungan induk dan perbaikan jaringan irigasi bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. 2
Pemeliharaan Bendungan Induk dan Perbaikan Jaringan Irigasi



Sumber : P3A AIA DAREH 1 2024

Melalui Kegiatan Pemberdayaan berupa pemeliharaan bendungan dan Perbaikan jaringan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga membantu P3A AIA DAREH 1 untuk mendapatkan dana yang diberikan Pemerintah berupa P3 TGAI dengan adanya program ini meringankan salah satu kesulitan yang dirasakan oleh P3A berupa dana. Dalam pelaksanaan pemeliharaan bendungan dan perbaikan jaringan ini. P3A mengikutsertakan anggota dan masyarakat yang ingin bekerja dalam pembangunan bendungan induk.

Dengan pekerja yang diambil dari anggota dan masyarakat juga bisa merasakan manfaat bagi P3A AIA DAREH 1 dan masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua P3A sebagai berikut:

“Dengan diambil masyarakat dan anggota P3A sebagai pekerja dalam pembuatan bendungan induk ini manfaat yang dirasakan adalah penyelesaian dalam pembangunan bendungan bisa diselesaikan dengan baik, masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, dan terjalin hubungan yang baik antara P3A dengan masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Yasri Ketua P3A AIA DAREH 1 Nagari Limo Koto Kabupaten Pasaman 7 Maret 2024 pukul: 15.00 WIB).

Dari kutipan wawancara ini bisa diketahui bahwa manfaat dari perbaikan bendungan induk tidak hanya menguntungkan P3A tetapi juga menguntungkan masyarakat sekitar dengan adanya perbaikan itu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah Limo Koto dan sekitarnya. Selain itu dalam pelaksanaan juga tidak terjadi kesulitan karena setiap sawah yang dilalui dalam perbaikan jaringan irigasi juga diikuti sertakan para petani yang sawahnya dilewati jaringan irigasi.

Selanjutnya P3A juga meningkatkan pengelolaan air jaringan irigasi sawah yang ada dengan membersihkan batang kayu yang berada di sekitaran jaringan kemudian membuang batuan sedimen baik berupa kerikil, pasir dan lumpur. Yang dilakukan dengan swadaya. Dengan dilakukannya kegiatan tadi membuat aliran air pada jaringan irigasi tidak tersumbat dan mengurangi resiko kekeringan pada sawah.

Kemudian untuk lebih mengetahui bagaimana pengelolaan air irigasi yang baik maka dilakukan pelatihan dan pembinaan oleh Dinas PUPR kepada P3A yang ada di Kabupaten Pasaman. Dalam pelaksanaannya Dinas PUPR mengundang seluruh P3A yang ada Kabupaten Pasaman yang dihadiri oleh ketua sekretaris dan bendahara per P3A selanjutnya pelaksanaan pelatihan ini dilakukan pada tgl 1-3

November 2021, dalam pelatihan pengelolaan irigasi dimana pada pelatihan ini membahas tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh P3A mengatur ketinggian air yang diperlukan untuk mengairi sawah dengan luas yang telah ditentukan kemudian cara membuat irigasi yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Dinas PUPR agar pengelolaannya bisa berjalan dengan baik, dan terakhir cara yang bisa dilakukan apabila terjadi bencana dalam pengelolaan air irigasi.

Gambar 1. 3
Pelatihan P3A Oleh Dinas PUPR



Sumber: Dinas PUPR 2024

Melalui gambar diatas bisa dilihat bahwa Dinas PUPR Memberikan pelatihan kepada seluruh P3A yang ada di Kabupaten Pasaman, agar P3A yang ada bisa meningkatkan pengelolaan irigasi yang ada di daerah irigasi masing-masing dan kebutuhan air yang diperlukan untuk sawah bisa terpenuhi.

Pada penelitian ini peneliti menganalisis fenomena menggunakan konsep pemberdayaan Suharto melalui pendekatan 5p yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*)

dan Pemeliharaan (*fostering*). Pada tahap Pemungkinan (*enabling*) Dinas PUPR melakukan sosialisasi kepada P3A mengenai program pelatihan yang akan diberikan agar memberikan pengetahuan kepada P3A supaya bisa menaikkan produksi padi yang dimiliki petani juga dengan cara ini Dinas PUPR bisa mendekati diri kepada P3A agar bisa mengetahui permasalahan apa saja yang dirasakan oleh petani sehingga bisa dicarikan solusi dan cara untuk mengatasinya. Selanjutnya Dinas PUPR.

Pada tahap Penguatan (*empowering*) Dinas PUPR melakukan pembimbingan dan pelatihan kepada P3A AIA DAREH 1 berupa pengelolaan irigasi, dengan memberikan pelatihan peningkatan kapasitas P3A, supaya bisa mengetahui cara yang dilakukan oleh P3A untuk mengatur ketinggian air yang diperlukan untuk mengairi sawah, dan cara membuat irigasi yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Dinas PUPR sehingga aliran air yang diperlukan untuk mengairi sawah masyarakat bisa tercukupi dengan baik dan dapat meningkatkan hasil padi petani. Selain juga memberikan pembimbingan kepada P3A supaya bisa lebih memahami pentingnya peran dari P3A dengan memberikan seminar motivasi peran P3A agar P3A tersebut bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi kendala dalam melakukan tugasnya.

Pada tahap Perlindungan (*protecting*) Dinas PUPR melakukan perlindungan kepada P3A dengan cara meminimalisir pelatihan bisa tercapai kepada seluruh anggota P3A dalam pengimplementasian pelatihan P3A AIA DAREH 1 mengikutsertakan setiap petani yang tergabung dalam perkumpulan agar setiap petani bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan yang diberikandan tidak terjadinya

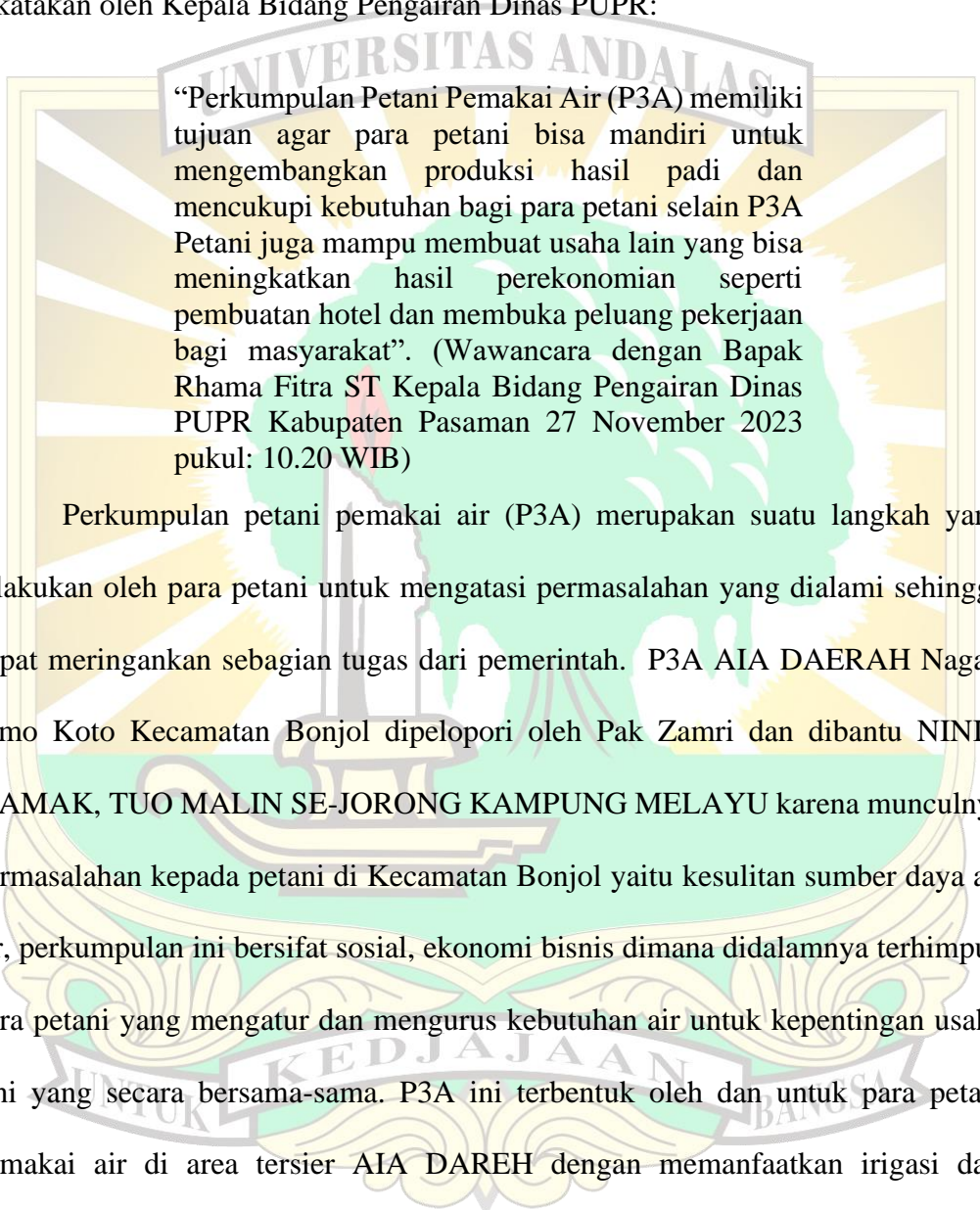
perselisihan antara petani dengan P3A, dan memberikan sanksi pelanggar yang berbuat curang saat dilakukannya perbaikan jaringan irigasi. melalui ini juga bisa mendekatkan hubungan antara P3A dengan Dinas PUPR.

Pada tahap Penyokongan (*supporting*) Dinas PUPR melakukan bantuan kepada P3A AIA DAREH 1 dalam melakukan penghimpunan dana berupa bantuan, dalam melengkapi bahan yang dibutuhkan untuk mendapatkan dana dari pemerintah dengan cara membantu pengurusan SK Notaris untuk memenuhi syarat yang diminta oleh pemerintah, sehingga P3A bisa menerima bantuan dana yang diberikan untuk melakukan perbaikan jaringan irigasi dan pemeliharaan lainnya.

Pada tahap pemeliharaan (*fostering*) Dinas PUPR melakukan evaluasi tentang perkembangan P3A AIA DAREH 1 dengan memonitoring kegiatan yang dilaksanakan P3A sehingga apabila ada P3A yang tidak berkembang dengan pelaksanaan tersebut maka bisa dicarikan cara agar setiap P3A bisa berkembang dalam melakukan evaluasi ini peran dari Bappeda dan Dinas Pertanian sangat berpengaruh karena kedua dinas ini merupakan bagian komisi irigasi sebagai pengawas, memonitoring, dan menampung aspirasi irigasi dari suatu daerah. Namun upaya ini belum bisa dilakukan oleh Dinas PUPR

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu menyelesaikan permasalahan yang dialami dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang didapatkan baik dari alam dan pemerintah, melalui program kerja melalui program kegiatan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat merupakan proses yang dialami masyarakat tanpa melihat gender dan yang paling diutamakan masyarakat yang terbelakang. Dengan berjalan pemberdayaan ini kesejahteraan yang diharapkan bisa dicapai. Hal ini juga dikatakan oleh Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR:



“Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) memiliki tujuan agar para petani bisa mandiri untuk mengembangkan produksi hasil padi dan mencukupi kebutuhan bagi para petani selain P3A Petani juga mampu membuat usaha lain yang bisa meningkatkan hasil perekonomian seperti pembuatan hotel dan membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat”. (Wawancara dengan Bapak Rhama Fitra ST Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR Kabupaten Pasaman 27 November 2023 pukul: 10.20 WIB)

Perkumpulan petani pemakai air (P3A) merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh para petani untuk mengatasi permasalahan yang dialami sehingga dapat meringankan sebagian tugas dari pemerintah. P3A AIA DAERAH Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol dipelopori oleh Pak Zamri dan dibantu NINIK MAMAK, TUO MALIN SE-JORONG KAMPUNG MELAYU karena munculnya permasalahan kepada petani di Kecamatan Bonjol yaitu kesulitan sumber daya air, perkumpulan ini bersifat sosial, ekonomi bisnis dimana didalamnya terhimpun para petani yang mengatur dan mengurus kebutuhan air untuk kepentingan usaha tani yang secara bersama-sama. P3A ini terbentuk oleh dan untuk para petani pemakai air di area tersier AIA DAREH dengan memanfaatkan irigasi dari Bendungan AIA DAREH di Kecamatan Bonjol, sebagai hasil dari kesadaran kepentingan bersama. Berdasarkan Permasalahan melalui latar belakang yang telah diuraikan diatas menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang “**Bagaimana**

Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AIA DAREH 1 dalam pengelolaan air irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman “

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang dibutuhkan untuk memberikan batasan terhadap suatu objek yang diteliti. Berdasarkan masalah yang dijelaskan dalam latar belakang maka peneliti mengangkat masalah tentang Bagaimana Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AIA DAREH 1 dalam pengelolaan air irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AIA DAREH 1 dalam pengelolaan air irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian diatas manfaat secara khusus, penelitian ini dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, yang memiliki manfaat secara teoritis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini memberikan manfaat berupa wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bidang Administrasi Publik, karena melalui penelitian ini terdapat beberapa kajian-kajian mengenai Pemberdayaan

Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AIA DAREH 1 dalam pengelolaan air irigasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa gambaran dan upaya yang dilakukan Dinas PUPR untuk melakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) AIA DAREH 1 dalam pengelolaan air irigasi. Dengan cara ini, pembaca bisa memahami bagaimana penerapan dan implementasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pasaman.

